



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAINAL ARIFIN PALIWANG
2. Jabatan : GUBERNUR
3. NHK : 95615

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **36.359.930.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 339 m2/225 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/180 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.509.930.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/1.200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2.000 m2/1.000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **662.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2013, HADIAH Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **143.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **158.400.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**



Sub Total	Rp.	37.323.330.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	37.323.330.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.